**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan Kesejahteraan Sosial**
     1. **Definisi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang terorganisir secara terpadu dan tersistematis. Istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Kesejahteraan merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi, dan disiplin ilmu lain. Kesejahteraan sosial merupakan gambaran kondisi suatu masyarakat yang layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat berfungsi sosial. Keberfungsian sosial tersebut dapat dicapai apabila dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu yang didasarkan pada keterpaduan antara kerangka pengetahuan *(body of knowledge)*, kerangka keterampilan *(body of skills)*, dan kerangka nilai *(body of values)* yang bertujuan membantu indvidu, kelompok masyarakat, dan organisasi sosial dalam mengembangkan segala potensi dan sumber yang ada dalam rangka meningkatkan ksejahteraan sosialnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Midgley dalam Adi (2013: 6) adalah sebagai berikut: “Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan”.

Kesejahteraan merupakan suatu kegiatan yang berpusat pada membantu orang-orang yang mengalami permasalahan sosial, kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan yang terfokus dan berintegrasi dengan permasalahan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Seorang pekerja sosial harus memiliki konsep tersebut dalam melakukan intervensinya, yaitu bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat dalam mencapai keberfungsian sosialnya dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Definisi kesejahteraann sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2012: 9) sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan- pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi kesejahteraan sosial tersebut memberikan pengertian bahwa dalam mencapai standar hidup yang memadai perlu dibuat suatu pelayanan sosial yang teroragnisir dari suatu institusi atau lembaga sehingga individu, kelompok ataupun masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan mereka sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri dan kehidupan mereka. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010: 1) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa dalam pemecahan masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas tentang kondisi sosial yang dialami masyarakat. Harus melibatkan peran dari berbagai institusi dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial ini. Pihak-pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini harus bekerjasama dan berkesinambungan agar terjadi peningkatan kualitas kehidupan individu, kelompok, maupun masyarakat. Sebagaimana dirumuskan oleh Wickenden yang dikutip oleh Suud (2006: 8) kesejahteraan sosial adalah:

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial. Sistem tersebut mengalami transformasi yang cepat sebagai jawaban terhadap transisi masyarakat kita dari kelangkaan kepada kelimpahan relatif dan kepada revolusi harapan yang meningkat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu usaha dimana agar individu, kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi kembali keberfungsian sosialnya. Di dalamnya terdapat peraturan, program, kebaikan, pelayanan yang dimana itu semua adalah upaya untuk menyediakan pertolongan kepada mereka. Semua hal itu bergerak dinamis sejalan dengan transisi masyarakat, sehingga pertolongan yang diberikan sesuai dengan keadaan masalah yang terdapat saat itu. Kesejahteraan sosial tercapai ketika masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, terjadinya keteraturan sosial, dan berjalannya peran serta status sosial nya di lingkungan sosial nya.

* + 1. **Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dapat meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat yang keberfungsian sosial nya terganggu. Melalui pengurangan tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 10) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka tujuan kesejahteraan sosial yang pertama mencakup seluruh sektor bidang kehidupan. Dimana tujuan kesejahteraan sosial dikatakan tercapai ketika standar bidang kehidupan telah terpenuhi. Ketika bidang-bidang kehidupan pokok dapat terpenuhi maka akan mengurangi goncangan dan tekanan yang dirasakan oleh individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu juga ketika hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar dan juga di lingkungan baik maka akan terjalin sebuah relasi yang baik pula. Hal ini dikarenakan mereka sudah mampu melaksanakan fungsi dan peranan nya di lingkungan dengan baik. Ketika bidang-bidang kehidupan tersebut telah tercapai maka tidak dapat dipungkiri peningkatan kesejahteran pun akan tercapai.

Tujuan kesejahteraan sosial yang kedua adalah agar individu, kelompok, dan masyarakat dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, dimana hal itu berarti mereka mampu bersosialisai kembali dengan baik. Melalui penggalian sumber-sumber, seperti potensi, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki. Serta meningkatkan dan mengembangkan tingkat kehidupan mereka, sehingga adanya perbedaan saat keberfungsian sosial mereka masih terganggu dan setelah keberfungsian sosial mereka kembali. Selain itu, Schneiderman dalam Fahrudin (2012: 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pemeliharaan sistem
2. Pengawasan sistem
3. Perubahan sistem

Penjelasan pertama yaitu pemeliharaan sistem adalah pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup, dan norma-norma yang menyangkut pelaksanaan berbagai peranan. Penjelasan yang kedua adalah pengawasan sistem dilakukan dengan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Dengan cara mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, re-sosialisasi, dan peningkatan kemampuan. Sedangkan penjelasan yang ketiga mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Penyelanggaraan kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelanggara kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahetaraan.

Tujuan kesejahteraan tersebut yang pertama menjelaskan bahwa meningkatnya kesejahteraan jika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi. Tujuan kedua yaitu mengembalikan fungsi sosial dari individu, kelompok, ataupun masyarakat yang sebelumnya sempat terganggu sehingga mereka menjadi mandiri dalam menjalani kehidupan.

Tujuan ketiga adalah menjaga ketahanan kesejahteraan sosialnya ketika terdapat masalah dan masalah tersebut dapat ditangani. Tujuan keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap sesama, terutama tanggung jawab sosial bagi pelaku usaha kepada masyarakat di sekitar. Tujuan kelima adalah meningkatkan manajemen kesejahteraan sosial agar dapat berdayaguna yang efektif dan efisien.

* + 1. **Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang mengakibatkan keberfungsian sosial dari individu, kelompok, dan masyarakat terganggu. Menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2012: 12) mengemukakan bahwa:

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan- perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi- konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menghilangkan berbagai tekanan yang diciptakan pada perubahan sosio-ekonomi, dimana perubahan sosio-ekonomi ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang mengalami masalah. Dalam hal ini fungsi kesejahteraan akan mengurangi dan menghilangkan tekanan-tekanan tersebut. Selain itu juga memberikan suatu gambaran yang positif mengenai pembangunan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dan juga menciptakan kondisi sosial di masyarakat yang kondusif sehingga tingkat kesejahteraan mereka dapat meningkat. Menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2012: 12) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut dibagi kedalam empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi kesejahteraan sosial di atas dapat diterapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dalam menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan juga dapat membantu permasalahan yang sedang dialami oleh individu, keluarga, ataupun kelompok. Fungsi pencegahan berfungsi untuk memperkuat individu, kelompok, dan masyarakat untuk terhinda dari masalah sosial.

Fungsi penyembuhan membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi, demi tercapainya kondisi sosial yang kondusif. Fungsi pengembangan dalam hal ini berarti memberikan bantuan atau sumbangan demi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan masyarakat. Fungsi penunjang yaitu membuat suatu kegiatan yang menunjang peningaktan bidang pelyanan kesejahteraan sosial.

* + 1. **Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial**

Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial, karena bidang kesejahteraan sosial cakupannya sangat luas. Dalam arti sempit dijelaskan menurut Fink, Friedlander, Mendoza, dan Zastrow dalam Isbandi (2005: 128), antara lain meliputi:

1. Bidang yang terkait dengan Sistem Pelayanan Layanan (*Sevice Delivery System*)
2. Bidang yang terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga
3. Bidang yang terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda
4. Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia)
5. Bidang yang terkait dengan Kelompok Khusus
6. Bidang yang terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial)
7. Bidang yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan
8. Bidang yang terkait dengan Perumahan dan Lingkungan Sosial
9. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat
10. Bidang yang terkait dengan Perawatan Medik
11. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa
12. Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional
13. Bidang yang terkait dengan Lembaga Pendidikan
14. Bidang yang terkait dengan Area lain
    1. **Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**
       1. **Definisi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang memiliki kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka. Sehingga mereka dapat berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Pekerja sosial berusaha membantu mereka mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya. Definisi pekerjaan sosial menurut Siporin dalam Fahrudin (2012: 61) sebagai berikut:

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Penjelasan di atas memberikan penjelasan bahwa pekerjaan sosial sebagai metode untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat memecahkan masalah sosial yang mereka miliki. Selain itu juga mencegah terjadinya masalah sosial, semua itu demi meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Dalam menjalankan tugas-tugasnya pekerjaan sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan mengenai *human relation* (relasi antar manusia). Zastrow dalam Suharto (2010: 24) mengemukakan definisi pekerjaan sosial sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptkan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dimana bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dari masalah sosial yang mereka hadapi. Fokus tujuan utama pekerjaan sosial adalah membantu mereka dalam menghadapi masalah sosial mereka. Dalam hal ini jika masalah sosial yang mereka miliki telah dapat ditangani maka akan meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosial mereka. Sehingga peran dan status sosial mereka di masyarakat dapat berfungsi kembali, dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif.

* + 1. **Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Untuk mencapai itu semua pekerjaan sosial memiliki fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial. Fungsi dasar pekerjaan sosial menurut Max Siporin dalam Huraerah (2008: 39) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan akses (*access services*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial tersebut dengan memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan-pelayanan sosial tersebut membantu mereka untuk mencegah, memperbaiki masalah sosial yang terjadi, dan juga meningkatkan taraf kehidupan mereka. Fungsi dasar pekerjaan sosial ini memberikan tujuan kepada individu, kelompok, dan masyarakat sehingga mereka dapat berfungsi kembali di masyarakat dan kesejahteraan sosial mereka dapat tercapai.

* + 1. **Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial di dalam melaksanakan kegiatan profesional nya memusatkan perhatian pada keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Lingkungan dan interaksi sosial mereka juga tak luput dari perhatian pekerjaan sosial. Hal itu agar semua aspek kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat dapat benar-benar berfungsi kembali. Selain fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial, pekerjaan sosial juga memiliki tujuan yang perlu dicapai. Iskandar (2013: 29) mengemukakan tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Menolong orang-orang dalam memperluas kompetisi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah, untuk itu perlu dilakukan dengan:
2. Membantu kelayan untuk melihat kesulitan-kesulitasnnya dengan ketulusan,
3. Mempertimbangkan berbagai alternatif penyembuhan,
4. Memelihara kesadaran kelayan akan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuannya dan menggali serta memanfaatkan sumber-sumber pemecahan masalah,
5. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri, mengajarkan strategi pemecahan masalah dan keterampilan hubungan antar pribadi, dan sebagainya.
6. Membantu orang mencapai sumber-sumber pelayanan sosial, baik sebagai perantara untuk menghubungkan antara orang dengan sumber-sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam memecahkan suatu permasalahan, maupun sebagai orang yang dapat membantu menciptakan sumber pelayanan yang baru serta melakukan koordinasi antara pemerintah dan anggota suatu kolektivitas tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan.
7. Mengusahakan agar organisasi-organisasi pelayanan sosial menjadi semakin responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu.
8. Mendorong terjadinya interaksi-interaksi yang konstruktif antara individu di dalam lingkungannya. Hal ini dapat dicapai dengan:
9. Meningkatkan dan memperbaiki komunikasi di dalam lingkungan keluarga,
10. Membantu suatu kelompok agar dapat memberikan dukungan penuh bagi para anggotanya, dan lain sebagainya.
11. Mempengaruhi hubungan antara badan-badan sosial pemerintah dan swasta sehingga terjadi kekuatan interaksi di dalam sistem ini.
12. Mempengaruhi kebijakan sosial maupun lingkungan.
    * 1. **Tahap-tahap Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial dalam melakukan proses pertolongan kepada klien melalui tahapan intervensi. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, potensi, kebutuhan, dan sistem sumber yang ada dan dibutuhkan oleh klien. Tujuan dari tahapan intervensi untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dan meningkatkan kesejahteraan sosial klien. Menurut Iskandar (2013: 59) tahapan intervensi pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Engagement*, *Intake* dan Kontrak

Tahap ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan kelayan, pelayanan yang dapat diberikan pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan kelayan atau memecahkan masalah kelayan. Di dalam kondisi seperti ini terjadi proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan kelayan kepada pekerja sosial dan menciptakan relasi pertolongan yang baik berdasarkan profesional.

Setelah melakukan pengenalan terjai suatu kontrak antara pekerja sosial dengan kelayan. Dimana kontrak merupakan kesepakatan bersama antara praktikan dengan kelayan yang di dalamnya dirumuskan tentang hakekat permasalahan kelayan, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan kelayan, metoda-metoda yang digunakan serta peraturan-peraturan pertolongan lainnya.

1. Tahap Assessment

Tahap ini merupakan tahap pengungkapan masalah yang dapat diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang ada. Di dalam assesment meliputui hal-hal seperti analisa struktur masalah kelayan, dan analisa struktur dinamika kepribadian kelayan. Data tersebut bisa didapat melalui wawancara, observasi, studi file-file, dan sebagainya.

1. Tahap *Planning of Intrevention*

Dalam tahap *planning of intervention* pekerja sosial merumuskan tujuan pemecahan masalah, sasaran perubahan, program dan langkah-langlah kegiatan pemecahan masalah, metoda-metoda yang akan digunakan. Di dalam *planning of intervention* ini mencakup seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan pemecahan masalah di dalam proses intervensi.

1. Tahap Pelaksanaan Intervensi

Pekerja sosial melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah kelayan berdasarkan rencana intervensi yang telah dibuat. Dalam pemecahan masalah hendaknya pekerja sosial bekerja bersama-sama kelayan, bukan bekerja untuk kelayan, jadi melibatkan keaktifan dari kelayan. Hal ini sangat menntukan bagi keberhasilan intervensi, karena kelayan sendiri yang akan menentukan keberhasilan itu.

1. Tahap Evaluasi

Setelah melakukan intervensi, pekerja sosial mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai, serta kegagalan-kegagalan apa yang dialmai dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Tujuan hasil dan tujuan proses merupakan dua hal penting yang perlu mendapat evaluasi.

1. Tahap Terminasi dan Referal

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah tercapai, bilamana karena alasan-alasan rasional kelayan tidak mau melanjutkan proses pertolongan, atau bilamana terjadi referal yaitu pemindahan terhadap pekerja sosial lain dikarenakan suatu alasan tertentu.

Tahapan intervensi ini dilakukan jika ada klien yang memerlukan pertolongan, atau jika ada suatu permasalahan sosial yang membutuhkan tahapan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan siswa penerima bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), jika siswa memiliki permasalahan dalam bidang akademik, maka pekerja sosial dapat membantu. Karena pekerja sosial dalam setting pendidikan seharusnya ada tetapi di Indonesia masih belum banyak ditemukan. Tetapi pihak sekolah bisa memanggil pekerja sosial untuk menangani kasus yang ada di sekolah jika memang diperlukan.

* + 1. **Keberfungsian Sosial**

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat melalui suatu intervensi yang memiliki tujuan dan bermakna. Keberfungsian sosial dapat dicapai ketika tekanan-tekanan dan guncangan-guncangan yang diakibatkan oleh permasalahan sosial dapat dikurangi ataupun dihilangkan. Nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerjaan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka sehingga mereka mampu menjalankan peran dan status nya di masyarakat. Huda (2009: 26) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai berikut:

Keberfungsian sosial berarti seorang individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara normal dapat memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam batas ini keberfungsian sosial merupakan relasi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan penjelasan di atas keberfungsian sosial adalah kondisi dimana individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara normal dapat menjalankan tugas-tugasnya secara baik. Serta juga dapat memenuhi kebutuhan dasar nya, dan juga relasi dengan orang-orang di sekitar berjalan kondusif. Ketika hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungan dinamis dan harmonis, maka keberfungsian sosial tercapai. Sedangkan menurut Skidmore, Thackeray, dan Farley dalam Fahrudin (2011: 155) keberfungsian sosial adalah: “Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya”.

Keberfungsian sosial dengan penjelasan di atas merupakan suatu konsep yang sangat penting bagi pekerjaan sosial. Ketika seorang pekerjaan sosial melakukan aktivitas profesional nya kepada klien maka tujuan utama nya adalah mengembalikan kembali keberfungsian klien tersebut. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan profesi lainnya, pekerjaan sosial akan memastikan bahwa kliennya kembali mampu melaksanakan peranan sosial nya dengan baik, dan memiliki hubungan yang dinamis dengan lingkungannya.

Pekerjaan sosial juga menggunankan nilai, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan ketika menangani suatu masalah yang berkaitan dengan keberfungsian sosial kliennya. Melalui ketiga nilai dasar dalam praktek pekerjaan sosial diharapkan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Definisi keberfungsian sosial menurut Suharto (2010: 28) adalah sebagai berikut:

Keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial , serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stress*).

Keberfungsian sosial adalah ketika orang dan sistem sosial memiliki kemampuan atau kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (sandang, pangan, dan papan). Ketika seseorang telah kembali keberfungsian sosial nya maka ia pun saat itu juga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu juga dapat melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Keberfungsian sosial seseorang kembali juga ditandai ketika mereka mampu menghadapi goncangan dan tekanan masalah sosial nya. Jika ketiga hal tersebut sudah dapat dipenuhi maka keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat akan tercapai.

* 1. **Tinjauan tentang Kemiskinan dan Masalah Sosial**
     1. **Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar nya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi maka akan menjadi masalah sosial di masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di kehidupan masyarakat. Definisi kemiskinan menurut Badang Pusat Statistik dan Departemen Sosial dalam Suharto (2004: 133) sebagai berikut:

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kehidupan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan digambarkan sebagai keadaan ekonomi yang berada pada garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Kemiskinan dijelaskan juga sebagai kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebtuhan dasar nya, dan berada dalam kondisi serba kekurangan. Kekurangan disini berarti kekurangan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, tidak memenuhi nilai gizi, serta kekurangan kebutuhan dasar yang lainnya.

* + 1. **Ciri-ciri Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemiskinan dinilai sebagai suatu ketidakmampuan memenuhi sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh banyak faktor, oleh karena itu untuk melihat kemiskinan secara tepat yaitu dengan melihat ciri-ciri kemiskinan tersebut. Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2004: 7) adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaksinambungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Ciri-ciri yang dijelaskan di atas menandakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan keberfungsian sosial masyarakat yang belum terpenuhi. dengan adanya ciri-ciri tersebut kemiskinan dapat digolongkan sesuai dengan jenis kemiskinannya. Kemiskinan yang dibiarkan terlalu lama tanpa adanya proses penanggulangan akan mengakibatkan masalah sosial di kehidupan masyarakat.

* + 1. **Definisi Masalah Sosial**

Masalah sosial timbul karena individu merasa adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini berarti ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena masalah sosial telah berkembang secara dinamis dan melahirkan berbagai pandangan mengenai masalah sosial. Definisi masalah sosial menurut Soetomo (2013: 28) adalah sebagai berikut:

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi.

Penjelasan di atas bermakna masalah sosial adalah fenomena yang ada dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. Untuk memahami sebuah masalah sosial perlu dilakukan identifikasi, sehingga suatu permalahan tersebut dapat dikatakan masalah sosial atau bukan. Menurut Soekanto (2013: 314) definisi masalah sosial adalah sebagai berikut:

Masalah sosial merupakan suau ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Masalah sosial berkaitan dengan adanya unsur-unsur yang ada dalam kehidupan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. seringkali masalah sosial menyebabkan suatu kelompok masyarakat merasakan dampak dari masalah sosial tersebut. Ketika adanya unsur-unsur kehidupan masyarakat yang terkontaminasi oleh masalah sosial maka kehidupan masyarakat pun akan mengalami goncangan yang disebabkan oleh masalah sosial tersebut. Masalah sosial yang dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan penyakit sosial, dan menggangu keteraturan sosial. Masalah sosial menurut Robert K Merton dalam Huraerah (2011: 5) adalah sebagai berikut:

Masalah sosial mendefinisikan dengan menyebutkan ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya jurang perbedaan yang cukup signifikan antar standar-standar sosial dengan kenyataan sosial.

Menurut Merton masalah sosial terjadi karena adanya jurang perbedaan antara keinginan dan kenyataan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan individu maupun kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, nilai-nilai dan tujuan apa yang harus dicapai, dan bagaimana seharusnya bertindak dalam suatu masyarakat. Masalah sosial merupakan adanya harapan dan kenyataan yang tidak sesuai, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang cara menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

* + 1. **Karaketrisktik Masalah Sosial**

Horton dan Lesli dalam Suharto (2009: 152) memberikan pengertian masalah sosial sebagai berikut: “Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakterisktik sebagai berikut menurut Suharto (2011: 10):

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kriminalitas adalah salah satu contoh masalah sosial.

1. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Menurut faham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran ‘baik’ atau ‘buruk’ sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkotika, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum.

1. Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat sakit kepala. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

1. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara perseorangan atau satu per satu. Tetapi, masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (*social engineering*) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

* 1. **Tinjauan tentang Usaha Kesejahteraan Sosial**
     1. **Definisi Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha kesejahteraan sosial adalah salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Usaha kesejahteraan sosial ini untuk meningkatkan kesejahetraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Definisi usaha-usaha kesejahteraan sosial pada UU No. 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”.

Usaha kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan membuat suatu program ataupun kegiatan yang bertujuan dalam mewujudkan, membina, memelihara, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Usaha-usaha kesejahteraan tersebut dibuat dalam rangka mencegah, mengurangi, dan menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Definisi usaha kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2012: 15) sebagai berikut :

Sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha- usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Usaha kesejahteraan sosial menurut definisi di atas bahwa usaha kesejahteraan sosial memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dalam suatu bentuk program sosial yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat. Program sosial yang dibentuk ini ditujukan untuk seluruh bidang-bidang kehidupan tanpa terkecuali. Definisi usaha kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 yang dikutip Fahrudin (2012: 16) adalah sebagai berikut :

Usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan definisi usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan pengertian tersebut adalah usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terpadu dan terarah serta berkelanjutan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pelayanan sosial yang diberikan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dan memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (development).

* + 1. **Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial**

Tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh melalui beberapa program-program serta usaha kesejahteraan sosial lainnya. Usaha kesejahteraan sosial ini diberikan secara terpadu dan tersistematis agar tepat sasaran dan mencapai tujuan. Menurut Suharto (2010: 4) mengemukakan tiga tujuan usaha kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Peningkatan standar hidup

Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.

1. Peningkatan keberdayaan

Meningkatkan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menunjang tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.

1. Penyempurnaan kebebasan

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan partisipasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

* + 1. **Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial**

Kemiskinan menjadi salah satu fokus usaha kesejahteraan sosial, kemiskinan menjadi faktor penyebab terjadinya masalah sosial lainnya. Seperti halnya pada bidang pendidikan, masyarakat miskin yang tidak memberikan pendidikan kepada keluarga mereka menyebabkan masalah sosial terjadi. Masalah sosial yang terjadi seperti pekerja anak, anak terlantar, anak jalanan, dan lainnya. Dengan adanya usaha kesejahteraan sosial ini diharapkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat dapat berkurang dan menjadi tidak ada.

Suharto (2010: 9) berpendapat mengenai fokus usaha kesejateraan yaitu: “Usaha kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini usaha kesejahteraan sosial merujuk pada pemberian pelayanan sosial serta perlindungan sosial kepada masyarakat, sehingga dapat membantu mereka untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Selain itu juga dengan memberikan program-program yang di dalamnya terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam usaha memberdayakan masyarakat. Serta perlindungan sosial yang diberikan seperti pada bidang pendidikan untuk menunjang kebutuhan peserta didik.

* 1. **Tinjauan tentang Pelayanan Sosial**
     1. **Definisi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial melalui aksi dan tindakan. Pelayanan sosial melalui program-program bertujuan untuk melindungi atau mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat. Selain untuk mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat, pelayanan sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Definisi pelayanan sosial menurut Suharto (2009: 154) adalah sebagai berikut: “Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat pogram yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Pengertian pelayanan sosial tersebut memberikan pengertian bahwa untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial dan hambatan dalam mengakses pelayanan sosial maka dibuatlah suatu program yang signifikan dengan permasalahan tersebut. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial. Oleh sebab itu maka pelayanan sosial yang diberikan harus mudah diakses oleh seluruh orang yang menerimanya. Definisi pelayanan sosial menurut Huraerah (2011: 45) bahwa: “Pelayanan sosial yaitu kegiatan terorganisasi yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya”.

Pengertian pelayanan sosial menurut Huraerah tersebut bentuk pelayanan yang bersifat holistik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteran. Pelayanan sosial dalam hal ini berarti keluarga miskin yang tidak bisa memberikan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan adanya program beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP). Definisi pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin (2012: 51) adalah sebagai berikut :

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program- program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga- lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan akses pelayanan kepada masyarakat, pelayanan ini dapat berupa informasi ataupun program-program yang dibuat demi meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok ataupun masyarakat. Pelayanan sosial yang disediakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dijalankan dapat sesuai. Pelayanan sosial bergerak secara dinamis mengikuti setiap kebutuhan yang diperlukan masyarakat, sehingga pelayanan sosial yang dilakukan dapat tepat sasaran dan bermanfaat. Pelayanan sosial juga bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan-pelayanan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

* + 1. **Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial**

Jenis dan cakupan pelayanan sosial berfokus pada hal-hal yang mendasar pada bidang kehidupan. Jenis pelayanan sosial ditujukan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang memang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Spicker dan Thompson dalam Fahrudin (2009:155) terdapat lima bidang pelayanan sosial yaitu:

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial (*social security*) menunjuk pada sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem Negara Kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin bahwa terdapat jaring pengaman pendapatan (*financial safety net*) bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

1. Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khususnya mereka yang tergolong keluarga kurang mampu. Pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah perumahan publik atau perumahan sosial.

1. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai. Melainkan pula orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi warga kurang mampu, yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan. Selain itu, peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik ini juga mencakup pemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

1. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi, dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenngara pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta, maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skemabeasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswi yang berprestasi atau tidak mampu.

1. Pelayanan Sosial Personal (*Personal Social Service*)

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang pelayanan Pekerja Sosial populer sejak tahun 1960-an. Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial (*social care*) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. dalam garis besar, pelayanan ini mencakup tiga jenis:

1. Perawatan anak (*child care*).

Perawatan anak diberikan terhadap anak-anak dan keluarganya, terutama anak-anak yang meiliki kebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami cacat fisik dan mental yang tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa pertolongan pihak lain. Pelayanan ini bisa pula mencakup pelrindungan anak (*child protection*) dan pengasuhan anak, misalnya terhadap anak-anak yang ibunya bekerja, khususnya jika pelayanan pendukung tidak tersedia.

1. Perawatan masyarakat (*community care*)

Merupakan alternatif terhadap pelayanan yang diberikan di dalam lembaga (*institution-based care*). Pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation*) dan rehabilitasi keliling (*mobile rehabalititation*), misalnya merupakan salah satu bentuk community care yang umum diberikan oleh Dinas atau Kantor Sosial di Indonesia. Pelayanan umumnya diberikan di rumah atau di lingkungan masyarakat terhadap mereka yang mengalami gangguan fisik atau mental yang memerlukan penanganan profesional selain bantuan dari pihak keluarga dan warga masyarakat setempat. Fasilitas dan sumber pendanaan juga biasanya diinvestasikan di dalam komunitas yang bersangkutan.

1. Peradilan kriminal (*criminal justice*)

Pekerja sosial memiliki peranan penting dalam sistem peradilan kriminal. Mereka biasanya disebut dengan Pekerja Sosial Koreksional (*Correctional Social Worker*). Biasanya mereka memberikan pelayanan konsleing atau terapi psikososial terhadap narapidanan yang masih berada di penjara, maupun terhadap eks-narapidana yang telah kembali ke masyarakat.

* 1. **Tinjauan tentang Perlindungan Sosial**
     1. **Definisi Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam penanggulangan kemiskinan dan mengurangi tekanan-tekanan dan goncangan yang dialami masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah sosial yang ada di kehidupan mereka. Perlindungan sosial menurut Suharto (2011:87) dapat didefinisikan sebagai berikut:

Perlindungan sosial adalah segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan (*livelihood*) dan meningkatkan status dan hak sosial masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas perlindungan sosial merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat untuk memberikan bantuan keapada masyarakat miskin yang membutuhkan. Sebagai salah satu kebijakan publik maka perlindungan sosial merujuk pada berbagai pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin. Progran-program yang dibuat melalui perlindungan sosial memiliki ketetapan yang bertujuan untuk melindungi warganya dari resiko penghidupan, yaitu salah satunya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Melalui perlindungan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan status dan hak sosial masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran dan status di lingkungan sosialnya.

Selain kebijakan publik yang bersifat formal, menurut Suharto (2011: 88) mengungkapkan bahwa perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, serta skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat (*community-based safety nets*) lainnya.

* + 1. **Bantuan Sosial**

Bantuan sosial (social assistance) merupakan salah satu dari jenis perlindungan sosial yang saat ini sedang gencar diterapkan oleh pemerintah. Bantuan sosial diberikan dengan bertujuan dapat menanggulangi kemiskinan secara langsung dan tepat sasaran. Sekama bantuan sosial ini untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial nya. Masyarakat yang mendapatkan bantuan diharapkan dapat kembali berfungsi keberfungsian sosialnya dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Suharto (2011: 88) definisi bantuan sosial adalah sebagai berikut:

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (social security) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok-kelompok masyarakat ini seperti anak-anak, jompo, penyandang cacat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar nya. Kelompok rentan tersebut merupakan sasaran utama kebijkan sosial melalalui bantuan sosial ini. Bantuan sosial yang efektif dan efisien erat kaitannya dengan penerima bantuan, hak yang seharusnya diterima, serta proses administrasi.

Dalam bidang pendidikan bantuan sosial diberikan berupa bantuan uang per bulannya ataupun beasiswa yang bermanfaat bagi keperluan kebutuhan sekolah mereka. Masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan menjadi sasaran utama dalam bantuan sosial pendidikan ini. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk dari bantuan sosial yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga nya yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Bantuan sosial tersebut bertujuan agar warga DKI Jakarta dapat mengakses pendidikan minimal sampai Wajib Belajar 12 Tahun atau sampai ke jenjan Sekolah Menengah Atas (SMA).

* 1. **Tinjauan tentang Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)**
     1. **Definisi Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat miskin dalam bidang pendidikan, melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta sehingga anggota keluarga mereka dapat mengenyam pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun.

Definisi Kartu Jakarta Pintar dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 menyatakan: “Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Personal Pendidikan”.

Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang berada di DKI Jakarta. Program ini memberikan biaya operasional pendidikan kepada siswa miskin yang mendapatkan beasiswa Kartu Jakarta Pintar ini. Biaya operasional pendidikannya dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan sosial yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan agar siswa miskin di DKI Jakarta dapat mengikuti program Wajib Belajar 12 tahun serta memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Sehingga masyarakat miskin dapat dengan mudah dalam mengakses pendidikan, dan angka putus sekolah pun dapat dikurangi dengan adanya program perlindungan sosial ini.

* + 1. **Tujuan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar (KJ) pada dasarnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yaitu dalam bidang pendidikan. Serta memberikan pelayanan sosial kepada masyrakat miskin agar anggota keluarga nya dapat menempuh pendidikan sampai jenjang SMA/SMK/Sederajat. Tujuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 pasal 3 sebagai berikut:

1. Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
3. Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan; dan
4. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Kualitas hasil pendidikan dapat terlihat dari hasil belajar yang bagus, motivasi belajar siswa yang meningkat, serta akses yang mudah pada setiap pelayanan yang ada di sekolah.

Melalui program ini diharapkan masyarakat miskin dapat memikirkan pendidikan anggota keluarga mereka sehingga angka putus sekolah dapat berkurang. Setiap negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada warga negaranya tanpa terkecuali, oleh karena itu setiap daerah memiliki kebijakannya tersendiri dalam mengatur pendidikan di daerahnya. Hal ini agar masyarakat miskin dapat dengan mudah mengakses pendidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang berkualitas.

* + 1. **Manfaat dan Dampak Positif Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Perlindungan sosial yang dibuat oleh emeprintah memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh penerimanya. Dengan begitu makan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat berdaya guna dan memiliki manfaat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat dan dampak positif dari terselenggaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) antara lain:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Meringankan biaya personal pendidikan.
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan  akibat kesulitan ekonomi.
4. Mendorong siswa putus sekolah (drop out) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
5. Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
   * 1. **Persyaratan Penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Setiap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan penerima bantuan prorgram Kartu Jakarta Pintar (KJP) perlu untuk memenuhi persyarakat yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya ke Suku Dinas/Dinas setempat.
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.
   * 1. **Kriteria dalam Penerimaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Peserta didik tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar sebagai berikut :

1. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba
2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3. Menggunakan angkutan umum
4. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
5. Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah
6. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
7. Daya pemanfaatan internet rendah
8. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.
   * 1. **Besaran dan Dana Pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

Besaran dana yang akan diterima oleh siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah ditentukan sebelumnya. Dana yang diberikan ini untuk biaya pendukung personal artinya pemenuhan kebutuhan peserta didik. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang artinya biaya untuk sekolah seperti uang spp, atau les tambahan di luar sekolah. Terdapat beberapa ketentuan dalam penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP):

1. Dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP.
2. Dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM.
3. Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa.
4. Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antar bank.

Besaran Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP):

1. Dana rutin dan berkala
2. Dana kebutuhan rutin dicairkan setiap tanggal 10 pada setiap bulannya sebesar :

Tabel 2.1 Dana Kebutuhan Rutin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENJANG** | **BESARAN** |
| 1. | SD/MI/SDLB | Rp 100.000 |
| 2. | SMP/MTs/SMPLB | Rp 150.000 |
| 3. | SMA/MA/SMALB | Rp 200.000 |
| 4. | SMK | Rp 200.000 |
| 5. | PKBM | Rp 100.000 |

*Sumber: Website Kartu Jakarta Pintar (KJP)*

Tabel di atas memberikan informasi bahwa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mendapatkan dana rutin dicairkan setiap bulannya. Dana rutin ini untuk keperluan kebutuhan siswa seperti uang saku, pembelian peralatan tulis, dan juga kebutuhan gizi siswa.

1. Dana kebutuhan berkala dicairkan pada :

Awal tahun ajaran sebesar 500.000 untuk seluruh tingkatan.

Selain dana rutin juga terdapat dana kebutuhan berkala yan dicairkan setiap enam bulan sekali pada awal semester di mulai. Dana ini bisa digunakan untuk membeli seragam sekolah siswa, sepatu, tas, untuk dana les tambahan, serta kebutuhan lainnya. Semua dana ini harus digunakan oleh siswa sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dana yang di dapat dari Kartu Jakarta Pintar untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam hal perlengkapan dan peralatan siswa, juga untuk kebutuhan gizi siswa seperti membeli telur, daging ayam, dan daging sapi.

1. SPP Swasta
2. SPP swasta akan diautodebet dari rekening siswa ke rekening sekolah.
3. Jika SPP siswa di bawah jumlah alokasi, akan diautodebet sebesar jumlah SPP kerekening sekolah, sisanya menjadi hak siswa dan menjadi tabungan siswa.
4. Maksimal besaran SPP setiap tingkatan

Tabel 2.2 Besaran SPP Setiap Tingkatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENJANG** | **BESARAN** |
| 1. | SD/MI/SDLB | Rp 130.000 |
| 2. | SMP/MTs/SMPLB | Rp 170.000 |
| 3. | SMA/MA/SMALB | Rp 290.000 |
| 4. | SMK | Rp 240.000 |

*Sumber: Website Kartu Jakarta Pintar (KJP)*

Tabel di atas memberikan informasi beasaran jumlah dana yang diberi untuk pembayaran spp untuk siswa yang bersekolah di swasta. Jika jumlah dana SPP siswa di atas kurang dari SPP yang seharusnya maka jumlah alokasi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

Sisa danapada akhir tahun ajaran, sisa dana sepenuhnya menjadi tabungan siswa, tidak hangus, dan dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru. Penggunaan dana KJP harus dilaporkan melalui sekolah dengan melampirkan struk pembelanjaan.

* 1. **Tinjauan tentang Proses Belajar**
     1. **Definisi Sekolah**

Pendidikan yang sudah dirancang dengan sistem yang sedemikian rupa tersebut diimplementasikan di suatu bangunan yang disebut sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa: “Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sekolah merupakan suatu representasi dan indikator bahwa sistem pendidikan dilaksanakan. Sekolah secara formal terdiri dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Pendidikan yang berkualitas ditandai dengan keadaan sekolah yang memadai serta sarana dan prasarana yang memadai juga. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keadaan sekolah yang kondusif menjadi salah satu faktor motivasi belajar siswa dapat meningkat. Motivasi belaja siswa dapat terbentuk salah satunya dengan adanya faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam hal ini lingkungan dan keadaan sekolah yang kondusif dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa

* + 1. **Definisi Siswa**

Siswa merupakan salah satu kompenen manusiawi yang menempatkan posisi sentral pada suatu pendidikan. Dalam sebuah pendidikan siswa menjadi objek dalam proses pembelajaran, sehingga ada *output* yang dapat dihasilkan. Siswa sering disebut sebagai *raw material* (bahan mentah) yang memiliki arti bahwa siswa menjadi pokok pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan.

Definisi siswa menurut Desmita (2012: 39) adalah sebagai berikut:

Siswa adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing- masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, siswa memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.

Dari pengertian di atas siswa adalah individu yang sedang dalam proses belajar dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Serta sedang belajar meningkatkan kemampuan melalui proses belajar untuk memperoleh prestasi bidang pendidikan baik itu secara formal maupun non formal. Selain itu juga seorang siswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan di setiap pencapaian tujuannya. Definisi siswa menurut Abu Achmadi (2003: 148) sebagai berikut: “Siswa atau peserta didik adalah seorang yang belum dapat dikatakan dewasa, ia memerlukan seseorang untuk membimbing dan juga berusaha sendiri untuk perlahan menemukan jati diri dan kedewasaan”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa siswa dalam proses belajar juga berusaha untuk menemukan jati dirinya. Dalam pembentukan motivasi belajar, seorang siswa memerlukan bimbingan dan arahan dari orang yang memang berpengaruh dalam hidupnya seperti orang tua, ataupun dari orang yang dekat dengannya seperti teman sebaya.

* + 1. **Teori Kebutuhan Peserta Didik**

Dalam kehidupannya setiap individu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tertutama kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan juga memiliki kebutuhan, salah satu kebutuhan yang diperlukan seperti perlengakapan dan juga peralatan yang menunjang pendidikan mereka, dan juga kebutuhan akan bidang akademik dan non akademik. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya. Terdapat tiga jenis kebutuhan manusia menurut Mcclelland dalam Desmita (2012: 60) yaitu:

1. *Need for achievement – N-ach* (kebutuhan untuk berprestasi) yaitu kebutuhan untuk bersaing atau melampaui standar pribadi.
2. *Need for powerment – N-pow* (kebutuhan untuk berkuasa) yaitu suatu kebuthan atau kecenderungan untuk memberi kesan atau mempunyai pengaruh atas orang lain dengan tujuan untuk dianggap sebagai seseorang yang kuat.
3. *Need for affiliation – N-aff* (kebutuhan untuk berafiliasi) yaitu suatu kecenderungan dari beberapa individu untuk mencari atau menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain, tanpa cenderung dan memandang status dan kedudukan jabatan ataupun pekerjaan.

Tiga jenis kebutuhan di atas menjelaskan bahwa kebutuhan peserta didik berorientasi pada bidang akademik, organisasi, dan juga pergaulan. Dimana masing-masing kebutuhan itu akan membentuk tingkah laku peserta didik. Tingkah laku yang terjadi menunjukkan bagaimana proses pencapaian peserta didik untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang terpenuhi juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa.

* + 1. **Definisi Belajar**

Belajar merupakan istilah tidak asing di dalam percakapan sehari-hari. Belajar menjadi suatu bagian yang terpenting dalam proses pendidikan, dimana peserta didik melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuannya dalam proses pembelajaran. Slameto dan Ali dalam Tohirin (2005: 8) mengemukakan definisi belajar sebagai berikut:

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu upaya membelajarkan atau suatu upaya mengarahkan aktivitas siswa ke arah aktivitas belajar. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi, yaitu interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan teman, serta siswa dengan lingkungan sekolahnya. Dalam proses belajar ada hal-hal yang mengalami perubahan, seperti perubahan tingkah laku, perubahan emosi, perubahan kognitif, dan sebagainya. Definisi belajar menurut Witherington dalam Purwanto (2014: 84) adalah sebagai berikut: “Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu perintah”

Definisi belajar di atas menjelaskan bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi bagi mereka yang melakukan aktivitas belajar. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan kepribadian dan juga kognitif di dalam diri seseorang. Melalui belajar ini akan terbentuk suatu perubahan berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu perintah dimana semua itu berkaitan dengan pencapaian hasil belajar nantinya. Menurut Morgan dalam Dalyono (2007: 211) mengemukakan tentang definisi belajar yaitu: “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman”.

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai perubahan yang relatif menetap. Artinya adalah perubahan yang terjadi relatif menetap dalam diri seseorang, dengan perubahan yang terjadi akan membawa dampak positif. Perubahan yang menetap ini berkaitan dengan tingkah laku yang ditimbulkan karena hasil dari latihan-latihan yang sering dilakukan dan pengalaman dari proses aktivitas belajar tersebut. Perubahan pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru sehingga menambah kemampuan dari orang yang melakukan aktivitas belajar tersebut.

Definisi belajar menurut Cronbach dalam Suryabrata (2014: 231) adalah sebagai berikut: “Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami, dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan pancainderanya”. Hal ini mengandung arti bahwa aktivitas belajar yang baik adalah dengan mengikuti semua kegiatan belajar secara langsung. Sehingga bertujuan agar pelajar yang mengikuti aktivitas belajar tersebut dapat menggunakan pancainderanya sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, aktivitas belajar dapat melatih dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

* + 1. **Definisi Proses Belajar**

Proses belajar adalah tahapan-tahapan dari berjalannya aktivitas belajar. Karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, dan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Definisi proses belajar menurut Syah (2010: 109) adalah sebagai berikut:

Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya.

Proses belajar adalah bentuk tahapan-tahapan dari aktivitas belajar yang dialami oleh seorang siswa. Proses belajar sama dengan belajar yang di dalamnya akan terjadi perubahan. Perubahan ini mengacu pada perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan kognitif berkaitan dengan kemampuan seorang siswa di dalam menerima informasi dari luar, mengolah dan menafsirkannya, serta kemampuannya di dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

Perubahan afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, dan perubahan yang terjadi pada pengelolaan perasaan dan emosi yang dimiliki. Perubahan psikomotor mngacu pada raeksi-reaki yang akan ditimbulkan ketika seorang siswa melihat suatu situasi. Perubahan psikomotor merupakan yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Perubahan yang terjadi berorientasi ke arah yang lebih positif dari sebelumnya.

* + 1. **Tahap-tahap dalam Proses Belajar**

Setiap proses belajar terjadi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini terjadi seiring proses belajar dilakukan. Tahapan belajar menurut Bandura dalam Syah (2010: 112) adalah sebagai berikut:

1. Tahap perhatian (*attentional phase*)

Pada tahap pertama ini para siswa/para peserta didik pada umumnya memusatkan perhatian pada obyek materi atau perilaku model yang lebih menarik terutama karena keunikannya dibanding dengan materi atau perilaku lain yang sebelumnya telah mereka ketahui.

1. Tahap penyimpanan dalam ingatan (*retentation phase*)

Pada tahap berikutnya, informasi berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, diproses dan disimpan di dalam memori. Para peserta didik lazimnya akan lebih baik dalam menangkap dan menyimpan segala informasi yang disampaikan atau perilaku yang dicontohkan apabila disertai penyebutan atau penulisan nama, istilah, dan label yang jelas serta contoh perbuatan yang akurat.

1. Tahap reproduksi (*reproduction phase*)

Pada tahap reproduksi, segala bayangan/citra mental (*imagery*) atau kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori para peserta didik itu diproduksi kembali.

1. Tahap motivasi (*motivation phase*)

Tahap terakhir dalam proses terjadinya peristiwa belajar atau pembelajaran adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai reinforcement, ‘penguatan’ bersemayamnya segala informasi dalam memori para peserta didik.

Melalui tahapan-tahapan belajar maka yang perlu dipahami adalah dalam proses belajar terdapat tahapan yang harus dilalui. Tahap yang pertama dengan membangun perhatian peserta didik tentang materi yang akan dibahas, peserta didik akan memusatkan perhatiannya ketika materi yang disampaikan menarik dan mengundang rasa ingin tahu mereka. Sehingga motivasi belajar mereka akan muncul dan aktivitas belajar dapat berjalan dengan baik.

Setelah itu siswa akan menyimpan informasi yang baru ia terima dan akan membaca kembali memori tersebut sehingga tersimpan dengan baik di dalam memori mereka. Ketika berada pada tahap motivasi siswa akan menguatkan motivasi belajar mereka dan memahami segala materi yang telah diterima dengan baik.

* + 1. **Ciri atau Prinsip Dalam Belajar**

Prinsip dalam belajar sangat penting untuk dipenuhi bagi peserta didik dan sangat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajarnya. Ciri atau prinsip dalam belajar menurut Suparno dalam Sardiman (2014: 38) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.
2. Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus
3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.
4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya.
5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.

Belajar adalah kegiatan yang aktif di mana subjek belajar membangun sendiri pengetahuannya. Subjek belajar juga mencari sendiri makna dari sesuatu yang mereka pelajari. Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka proses belajar mengajar memungkinkan peserta didik untuk merekonstruksi sendiri pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga subjek belajar dapat membentuk pengetahuan, dan membuat makna, mencari kejelasan dan menentukan justifikasi.

* 1. **Tinjauan tentang Motivasi Belajar**
     1. **Definisi Motivasi**

Sebelum meninjau motivasi, terlebih dahulu akan ditinjau mengenai pengertian motif menurut Woodworth dan Marques yang dikutip oleh Mustaqim dan Wahib (2010: 72) definisi motif adalah: “Motif adalah suatu tujuan jiwa yang mendorong individu untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi di sekitarnya.

Motif merupakan suatu tujuan yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam kehidupannya. Motif juga dilakukan ketika suatu individu akan melakukan sesuatu yang memiliki tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka haruslah ada motif yang mendorongnya untuk mewujudkan hal tersebut. Pendapat yang hampir sama tentang motif dikemukakan oleh Sardiman (2014: 73) yaitu sebagai berikut: “Motif adalah daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan definisi tersebut motif merupakan penggerak dari dalam diri yang nantinya akan diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut yang akan menunjang tercapainya tujuan dari motif tersebut. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencaai tujuan sangat dirasakan/mendesak. Artinya adalah motif muncul karena adanya suatu hal yang harus dilaksanakan serta memiliki tujuan. Motif tidak akan muncul jika tidak ada nya niat dan tujuan yang akan dicapai.

Motivasi dapat diartikan sebagai penggerak yang telah menjadi aktif yakni tindakan dari motif. Motivasi akan menyebabkan terjadinya perubahan energi pada diri manusia. Berkaitan dengan perasaan dan juga emosi, untuk kemudian melakukan sesuatu dan memiliki tindakan. Definisi motivasi menurut Eysenck dan kawan-kawan dalam Slameto (2010: 170) adalah sebagai berikut:

Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep- konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, dan sebagainya.

Motivasi dalam penjelasan di atas merupakan suatu poses yang nantinya menentukan tingkatan dari kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukan disebabkan oleh motif yang terjadi serta meningkatkan intensitas, konsistensi, dan arah dari suatu tingkah laku manusia. Motivasi juga sebagai suatu konsep yang rumit dimana mengandung arti bahwa motivasi harus dipahami dan diyakini terlebih dahulu. Konsep tersebut berkaitan dengan minat, konsep diri seseorang, serta sikap yang ditunjukkan.

Definisi lain dari motivasi yang dikemukakan oleh Hamalik dalam Wahab (2015: 127) yaitu: “Motivasi adalah sebagai suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Motivasi memiliki satu fokus yaitu untuk mencapai tujuan. Motivasi muncul pada diri seseorang yang kemudian timbul reaksi dari dalam diri untuk mengubah motivasi tersebut menjadi tindakan nyata dan menggapai tujuan yang telah ditentukan. Sarwono ( : 127) menyatakan definisi motivasi sebagai berikut:

Motivasi merupakan istilah yang lebih umum, yang merujuk kepada seluruh proses gerakan itu, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, perilaku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir daripada tindakan atau perbuatan.

Motivasi merujuk seluruh proses gerakan atau tindakan dari motif yang ditimbulkan. Motif dan motivasi ditandai dengan adanya situasi yang memang diperlukan dan berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian akan timbul dorongan dari dalam diri untuk kemudian dipalikasikan ke dalam suatu tindakan. Semua tindakan yang dilakukan akan menghasilkan hasil akhir yakni tujuan. Motivasi terbentuk karena adanya dorongan untuk mencapai agar berhasil.

* + 1. **Jenis-jenis Motivasi**

Berbicara tentang jenis-jenis motivasi, maka jenis-jenis motivasi tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan sudut pandang. Menurut Uno dalam Iskandar (2009: 188) jenis motivasi terdiri dari motivasi internal dan motivasi eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Internal (*Intrinsik Motivation*)

Motivasi internal merupakan daya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kita bawa ke dalam kegiatan pembelajaran motivasi internal merupakan daya dorong seseorang individu (siswa) untuk terus belajar berdasarkan suatu kebutuhan dan dorongan yang secara mutlak yang berhubungan dengan aktivitas belajar.

1. Motivasi Eksternal (*Ekstrinsik Motivation*)

Motivasi eksternal merupakan daya dorongan dari luar diri seseorang. Dalam kegiatan pembelajaran motivasi eksternal dari luar diri siswa, baik positif maupun negatif.

Motivasi internal merupakan modal utama bagi seseorang siswa apabila ingin sukses dan berhasil dalam belajar di kelas, sekolah, rumah, maupun sosial masyarakat. Motivasi internal timbul dari dalam diri siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Bukan berarti motivasi eksternal ini tidak baik dan tidak penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan motivasi terbesar yang siswa miliki untuk mencapai keberhasilan adalah melalui motivasi internal.

* + 1. **Definisi Motivasi Belajar**

Motivasi dan belajar saling mempengaruhi di antara keduanya. Belajar merupakan kegiatan yang mengubah tingkah laku melalui latihan dan pengalaman sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Motivasi merupakan hasrat dan dorongan untuk mencapai tujuan. Definisi motivasi belajar menurut Uno (2016: 23) adalah: “Dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung”.

Dorongan internal adalah dorongan yang terdapat dalam diri siswa, sedangkan dorongan eksternal merupakan dorongan yang pengaruhnya dari luar diri siswa. Indikator motivasi belajar menurut Uno dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (5) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.

Menurut (Winkels) dalam Iskandar (2009: 180) motivasi belajar adalah sebagai berikut:

Motivasi belajar merupakan motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan keseluruhan penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar dalam mencapai satu tujuan.

Motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam memberi rangsangan, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan proses pembelajaran. Motivasi belajar merupakan daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Definisi motivasi belajar menurut Wahab (2015: 128) sebagai berikut:

Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuannya dapat tercapai.

Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi merupakan keseluruhan dorongan yang dimiliki oleh siswa di dalam dirinya untuk melangsungkan kegiatan belajar. Sehingga tujuannya dapat belajar dapat tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Motivasi belajar sangat penting bagi siswa karena dengan adanya motivasi, mereka akan semangat dan fokus saat mengikuti aktivitas belajar.

* + 1. **Fungsi Motivasi Dalam Belajar**

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Motivasi sangat dibutuhkan dalam proses belajar para peserta didik. Berikut ini fungsi motivasi belajar menurut Wahab (2015: 131) yaitu:

1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu yang belum diketahui tersebut akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam rangka mncari tahu. Sikap itulah yang mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar.

1. Motivasi sebagai penggerak perbuatan

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisis.

1. Motivasi sebagai pengarah perbuatan

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar.

Fungsi motivasi memiliki peranannya masing-masing yang secara bertahap juga dibarengi dengan tindakannya. Fungsi pendorong perbuatan dimana ketika melaksanakan proses belajar pasti ada yang ingin diketahui. Oleh karena itu fungsi pendorong perbuatan ini melakukanya fungsinya agar peserta didik memiliki rasa ingin tahu dalam belajar. Fungsi penggerak perbuatan yaitu melahirkan sikap anak didik dari kekuatan yang ia miliki tentang proses belajar. Dan yang terkahir fungsi pengarah perbuatan dimana motivasi dapat memberikan penilaian kepada anak didik tentang mana yang baik dan buruk.

* + 1. **Prinsip-prinsip Motivasi Belajar**

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebiih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Berikut beberapa prinsip motivasi dalam belajar menurut Wahab (2015: 129) sebagai berikut:

1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggerkanya yang mendorong seseorang untuk belajar.
2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar.

Efek yang timbul dari pemberian motivasi esktrinsik adalah menyebabkan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luar dirinya, dan menyebabkan anak kurang percaya diri.

1. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada motivasi berupa hukuman.

Motivasi pujian diberikan ketika peserta didik memperoleh sesuatu yang baik, dan motivasi hukuman diberikan kepada anak didik untuk memberhentikan perilaku negatif anak didik.

1. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar.

Kebutuhan yang tak bisa dihindari oleh anak didik adalah keinginannya untuk menguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah anak didik belajar. Anak diik giat belajar untuk memenuhi kebutuhannya demi memuaskan rasa ingin tahunya terhadap sesuatu.

1. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar.

Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjan yang dilakukan. Dia yakin bahwa belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia.

1. Motivasi melahirkan prestasi belajar.

Dari berbagai macam hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi memengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seseorang anak didik.

Motivasi belajar memiliki peranan penting dalam proses belajar siswa. Motivasi belajar yang baik maka akan menghasilkan hasil belajar yang baik, sebaliknya jika motivasi belajar yang dimiliki siswa kurang maka hasil belajar nya pun tidak akan maksimal. Dengan kemudahan yang didapat siswa dalam mengakses pelayanan sekolah dan juga pemenuhan kebutuhan dasar hal itu diharapkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa.